



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PURBALINGGA

TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PURBALINGGA
2025

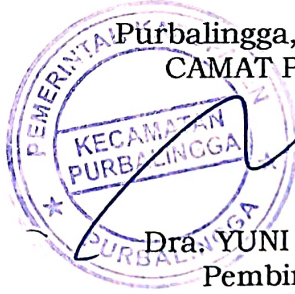
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Tencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2025-2030.

Dokumen Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2025-2030 pada hakikatnya adalah wujud komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa depan serta memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang kebijakan, strategi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga ini.

Purbalingga, Oktober 2025
CAMAT PURBALINGGA



Dra. YUNI RAHAYU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690601 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PURBALINGGA.....	7
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga	7
2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Purbalingga	14
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga	14
2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Purbalingga.....	27
2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Purbalingga.....	28
2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	32
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	32
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Purbalingga.	32
2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Purbalingga	33
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 – 2029 ...	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 – 2029	35
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN.....	38
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	38
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	120
BAB V. PENUTUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menandai reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara operasional diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bersifat indikatif. Bagi Kecamatan Purbalingga Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 16. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 -2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purbalingga setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 –2029.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Purbalingga periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kecamatan;

5. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan kecamatan (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan

Berisi Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga Sumber Daya Kecamatan Purbalingga, Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan Kecamatan Purbalingga, Isu Strategis Kecamatan Purbalingga.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

BAB IV : Program,Kegiatan,Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Purbalingga.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PURBALINGGA

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Purbalingga

2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Purbalingga adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian tengah dan berjarak 1 km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Purbalingga terdiri dari 13 desa/kelurahan, 8 dusun dengan rincian 68 Rukun Warga (RW) dan 251 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Purbalingga memiliki luas wilayah 1566 Ha yang terdiri dari lahan sawah: 625 Ha dan non sawah: 941 Ha.

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Purbalingga yaitu sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kaligondang
- Selatan : Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kalimanah
- Timur : Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bukateja
- Barat : Kecamatan Padamara

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Desa/Kel, Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1.	Bojong	158	-	5	25
2.	Toyareja	197	2	3	15
3.	Kedungmenjangan	127	-	3	12
4.	Jatisaba	194	3	5	11
5.	Bancar	121	-	6	18
6.	Purbalingga Wetan	87	-	9	28
7.	Penambongan	117	-	7	22
8.	Purbalingga Kidul	103	3	6	22
9.	Kandanggampang	52	-	5	18

No.	Desa/Kel	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
10.	Purbalingga Kulon	56	-	3	12
11.	Purbalingga Lor	84	-	6	24
12.	Kembaran Kulon	103	-	3	13
13.	Wirasana	166	-	7	31

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Purbalingga tercatat sebanyak 59.144 jiwa, terdiri dari laki-laki 29.350 jiwa (49.62%) dan perempuan 29.794 jiwa (50.38%). Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan per desa/kelurahan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bojong	2.546	2.394	4.940
2.	Toyareja	1.501	1.500	3.001
3.	Kedungmenjangan	1.585	1.636	3.221
4.	Jatisaba	1.819	1.853	3.672
5.	Bancar	1.906	1.978	3.884
6.	Purbalingga Wetan	2.501	2.605	5.106
7.	Penambongan	2.406	2.427	4.833
8.	Purbalingga Kidul	2.932	2.994	5.926
9.	Kandangpang	1.478	1.543	3.021
10.	Purbalingga Kulon	1.334	1.375	2.709
11.	Purbalingga Lor	3.174	3.212	6.386
12.	Kembaran Kulon	2.366	2.421	4.787
13.	Wirasana	3.802	3.856	7.658

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Purbalingga yaitu sebesar 0,75% dengan penduduk paling banyak berada di Kelurahan Wirasana dan penduduk yang paling sedikit berada di Kelurahan Purbalingga Kulon.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Purbalingga mengalami penambahan sebanyak 1.149 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Desa/Kel	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bojong	4.915	4.908	4.880	4.940	5.023
2.	Toyareja	2.851	2.905	2.989	3.001	3.033
3.	Kedungmenjangan	3.144	3.229	3.219	3.221	3.230
4.	Jatisaba	3.500	3.611	3.619	3.672	3.708
5.	Bancar	3.790	3.948	3.929	3.884	3.915
6.	Purbalingga Wetan	5.119	5.062	5.058	5.106	5.124
7.	Penambongan	4.774	4.813	4.815	4.833	4.833
8.	Purbalingga Kidul	5.539	5.854	5.880	5.926	6.022
9.	Kandangampang	2.944	3.015	3.022	3.021	3.008
10.	Purbalingga Kulon	2.575	2.657	2.685	2.709	2.732
11.	Purbalingga Lor	5.994	6.270	6.300	6.386	6.458
12.	Kembaran Kulon	4.660	4.778	4.779	4.787	4.842
13.	Wirasana	7.775	7.479	7.521	7.658	7.750

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga 2021,2022,2023,2024

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

a. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di kecamatan. Dilihat dari kuantitasnya, jumlah sarana Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Purbalingga terdiri dari:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1.	Bojong	3	3	0	1
2.	Toyareja	1	2	0	0
3.	Kedungmenjangan	1	2	0	1
4.	Jatisaba	3	3	0	0
5.	Bancar	3	4	3	2
6.	Purbalingga Wetan	4	3	1	2

No.	Desa/Kel	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
7.	Penambongan	3	2	1	0
8.	Purbalingga Kidul	4	1	2	1
9.	Kandanggampang	1	1	0	0
10.	Purbalingga Kulon	3	1	0	1
11.	Purbalingga Lor	4	6	2	1
12.	Kembaran Kulon	3	3	1	0
13.	Wirasana	3	4	1	0

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
1.	Bojong		1		1		1	12
2.	Toyareja							5
3.	Kedungmenjangan						1	8
4.	Jatisaba			1				7
5.	Bancar				1	1	1	6
6.	Purbalingga Wetan					4	1	7
7.	Penambongan					2	1	7
8.	Purbalingga Kidul				3	3	2	10
9.	Kandanggampang				1	1	2	6
10.	Purbalingga Kulon				1	2	2	6
11.	Purbalingga Lor	2				1		9
12.	Kembaran Kulon	1	1			4		6
13.	Wirasana							8

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

b. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Purbalingga terdiri dari 2 desa dengan status maju. Secara rinci status desa di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Status Desa Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1.	Toyareja	0.8286	0.6833	0.8	0.7706	MAJU
2.	Jatisaba	0.8343	0.6333	0.9333	0.8003	MAJU

Sumber: Kemendes Tahun 2024

c. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
**Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Purbalingga
Tahun 2024**

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1.	Bancar	179
2.	Bojong	172
3.	Jatisaba	158
4.	Kandangampang	165
5.	Kedungmenjangan	140
6.	Kembaran Kulon	433
7.	Penambongan	355
8.	Purbalingga Kidul	412
9.	Purbalingga Kulon	98
10.	Purbalingga Lor	309
11.	Purbalingga Wetan	121
12.	Toyareja	229
13.	Wirasana	504

d. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Terdapat 13 desa/kelurahan yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Purbalingga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8
Prevalensi Stunting Kecamatan Purbalingga Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
	KEC. PURBALINGGA	2660	25	182	201	7,56%
1.	BANCAR	131	0	5	5	3,82%
2.	BOJONG	270	3	12	15	5,56%
3.	JATISABA	167	0	14	14	8,38%
4.	KANDANG GAMPANG	142	0	12	12	8,45%
5.	KEDUNG MENJANGAN	162	0	12	12	7,41%
6.	KEMBARAN KULON	179	5	13	18	10,06%
7.	PENAMBONGAN	134	3	5	8	5,97%
8.	PURBALINGGA KIDUL	258	0	9	9	3,49%
9.	PURBALINGGA KULON	110	4	18	22	20%
10.	PURBALINGGA LOR	311	4	17	21	6,75%
11.	PURBALINGGA WETAN	219	3	16	19	8,68%
12.	TOYAREJA	157	3	10	13	8,28%
13.	WIRASANA	420	0	33	33	7,86%

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan

pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Purbalingga memiliki 2 (dua) BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Profil Bumdes Kecamatan Purbalingga

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	BUMDes Sejahtera	RT.02 RW.01 Desa Toyareja	Pembesaran Kambing, ayam petelur	Badan Hukum dalam proses	Toyareja/ Purbalingga
2.	BUMDes Jati Berkah Lestari	Jatisaba	Kerjasama dengan pihak ke III, peternakan, pertanian dan permodalan	Berbadan Hukum	Jatisaba/ Purbalingga

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga Tahun 2022-2024

Komponen SAKIP	Nilai		
	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	20.10	20.10	21.00
Pengukuran Kinerja	16.20	17.10	18.60
Pelaporan Kinerja	2.10	8.10	9.75
Evaluasi Internal	12.25	14.75	15.50
Nilai Total	57.21	60.06	64.86

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Purbalingga

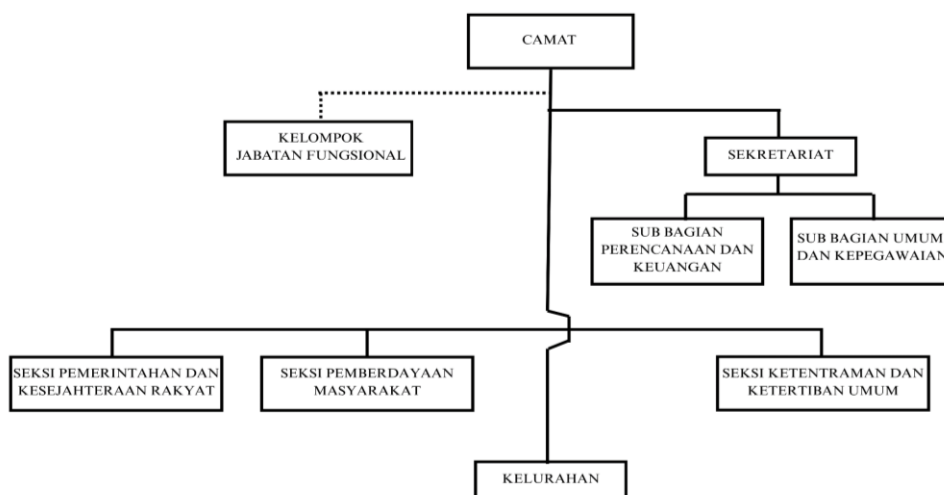
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Purbalingga

Kecamatan Purbalingga dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Kecamatan Purbalingga merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Purbalingga selaku Perangkat Daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Purbalingga merupakan Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Purbalingga
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Struktur Jabatan pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | = Eselon IV.a |
| d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum | = Eselon IV.b |

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
- Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta serta pihak lain di tingkat kecamatan guna peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan dan non perizinan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;

- k. Inventarisasi data rupa bumi;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan, pengisian dan mutasi perangkat Desa, serta pemilihan badan permusyawaratan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- s. Menyiapkan bahan dan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- u. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- w. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- x. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah sesuai kewenangannya;

- y. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat, Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. Pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;
- k. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Purbalingga

2.2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga didukung oleh personil sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Berdasarkan Jumlah Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pelaksana	3 Orang
6.	THL	5 Orang
JUMLAH		14 Orang

2.2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Purbalingga memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.12
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	7 unit
3.	Korden	50 buah
4.	Komputer	5 unit

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
5.	Laptop	7 unit
6	Printer	3 unit
7.	Mesin Penghisap Debu	1 buah
8.	Mesin Potong rumput	1 buah
9.	AC	7 buah
10.	Generating Set	1 buah
11.	Almari besi	8 buah
12.	Almari kaca	1 buah
13.	Filling cabinet	3 buah
14.	Meja Kerja	17 buah
15.	Meja Rapat	27 buah
16.	Kursi Kerja	34 buah
17.	Kursi rapat	156 buah
18.	Kursi Tamu	1 set
19.	Rak Arsip Besi	2 buah
20.	TV	2 buah
21.	Sound system	1 buah
22.	Kompor Gas	1 buah
23.	Gamelan	1 Set
24.	Kulkas	1 buah
25.	Dispenser	2 buah

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Purbalingga

Kinerja Pelayanan Kecamatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kecamatan atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Kecamatan Purbalingga melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			80,5	85	86	87	88	84.62	85.36	88.1	91.41	93.85	105.12	100.42	102.4	102.07	106.65
2	Nilai Kematangan Organisasi			22	29	29	33	33	22	29	29	33	33	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Kecamatan			NA	NA	62	64	66	NA	NA	57.21	60.06	64.86	NA	NA	92.27	93.84	98.27
4	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan			NA	NA	3.1	3.5	5	NA	NA	3.1	3.55	5	NA	NA	100	101.4	100

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Purbalingga selama periode 2020-2024 dapat dikategorikan baik. Indeks Kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang artinya bahwa pelayanan kepada masyarakat relatif baik dengan kecenderungan perbaikan. Nilai SAKIP Kecamatan konsisten di nilai BB sepanjang 2020-2024, namun tidak ada peningkatan level sehingga masih ada ruang untuk peningkatan kualitas kinerja akuntabilitas. Untuk nilai evaluasi publik kecamatan menunjukkan adanya peningkatan hal ini dapat diartikan tingkat kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan kecamatan sudah baik.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purbalingga

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	1.590.462.000	10.159.597.000	10.172.053.000	9.435.061.000	10.903.497.000	1.450.211.029	9.479.995.741	9.868.410.195	9.268.658.060	10.097.306.301	91.18	93.31	97.02	98.24	92.61	8.452.134.000	8.032.916.265
- Belanja Pegawai	1.031.179.000	9.682.647.000	9.665.106.000	9.139.252.000	10.225.926.000	962.818.216	9.193.938.741	9.374.278.796	8.980.602.913	9.457.843.207	93.37	94.95	96.99	98.26	92.49	7.948.822.000	7.593.896.375
- Belanja Barang dan Jasa	509.283.000	476.950.000	506.947.000	295.809.000	677.571.000	437.392.813	286.057.000	494.131.339	288.055.147	639.463.094	85.88	59.98	97.47	97.38	94.38	493.312.000	429.019.879
Belanja Modal	50.000.000	107.600.000	0	0	0	50.000.000	1.500.000	0	0	0	100	1.39	0	0	0	31.520.000	10.300.000
- Belanja Modal mesin lainnya	50.000.000	7.600.000	0	0	0	50.000.000	1.500.000	0	0	0	100	19.74	0	0	0	11.520.000	10.300.000
- Belanja Modal gedung	0	100.000.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
	1.590.462.000	10.267.197.000	10.172.053.000	9.435.061.000	10.903.497.000	1.450.211.029	9.481.495.741	9.868.410.195	9.268.658.060	10.097.306.301	91.18	92.35	97.02	98.24	92.61	8.452.134.000	8.032.916.265

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan Kecamatan Purbalingga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dari Belanja mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya ASN kecamatan Purbalingga yang pensiun.
2. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 prioritas belanja diarahkan pada kegiatan yang terkait pelayanan kepada masyarakat, sehingga belanja modal untuk pendukung operasional tidak dianggarkan.
3. Belanja barang dan jasa pada tahun 2024 mengalami kenaikan dikarenakan adanya dukungan operasional kegiatan pemilihan umum secara serentak.

2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Purbalingga meliputi:

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh PNS dan Tenaga Upah Bulanan;
2. Forkopimcam (Camat, Koramil, Kapolsek);
3. Instansi Lintas Sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Balai Penyuluh KB, Balai Penyuluh Pertanian, Puskesmas, KUA, PPAI, UPTD PU;
4. Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Purbalingga yaitu Kelurahan Bojong, Kelurahan Bancar, Kelurahan Kedungmenjangan, Kelurahan Kembaran Kulon, Kelurahan Kandangampang, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Purbalingga Lor, Kelurahan Wirasana, Kelurahan Penambongan, Desa Jatisaba dan Desa Toyareja;

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Purbalingga.

Permasalahan pelayanan kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas dengan kapasitas

kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Berikut identifikasi diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Purbalingga yaitu:

TABEL 2.16
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan pada bagian pelayanan	Masih kurangnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan
			Petugas pelayanan (<i>Front Office</i>) masih merangkap pekerjaan lain
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Banyaknya pelanggaran perda
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Purbalingga

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Isu Strategis Kecamatan Purbalingga dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Purbalingga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Purbalingga	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Purbalingga	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Purbalingga			Isu Strategis Kecamatan Purbalingga
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan: - o Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan - o Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa - o Belum Optimalnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan - o Kurangnya jumlah aparatur yang memadai terutama di kelurahan - o Belum optimalnya data kependudukan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	Kemajuan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Purbalingga disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, khususnya misi ketiga yaitu *“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.”* Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Purbalingga

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94	94.5	95	95.5	96	96.5	
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,22	4,32	4,42	4,52	4,62	4,72	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	69,56	70	70,5	71	71,5	72	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

kecamatan. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan, fokus pembangunan, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penahapan pembangunan dalam Renstra ini menggambarkan prioritas tahunan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Purbalingga

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima

Perumusan arah kebijakan Kecamatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 serta mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih terarah, konsisten, dan terukur. Rincian arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Purbalingga

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata Kelola pemerintahan kecamatan berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, berupa langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan. Program berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menentukan jumlah, jenis, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purbalingga dalam Renstra Tahun 2025–2029 telah menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode lima tahun yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi administrasi pembangunan desa/kelurahan. Program-program tersebut secara rinci mencakup:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Purbalingga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan		
			Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD	
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	
				Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Adnministrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	
			Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Sarpras Kelurahan Tepat Waktu	2.2 Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan		
					Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.2.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi kelurahan	2.2.3 Evaluasi Kelurahan	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Teridentifikasinya potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan		Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Purbalingga

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	9.903.080.000	100	10.471.543.000	100	10.995.120.000	100	11.544.876.000	100	12.122.120.000	100	12.728.226.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Persen	100	4.662.000	100	4.662.000	100	4.894.000	100	5.138.000	100	5.395.000	100	5.666.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2.872.000,00	2	2.872.000	2	3.014.000	2	3.165.000	2	3.323.000	2	3.490.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1.790.000,00	4	1.790.000	4	1.880.000	4	1.973.000	4	2.072.000	4	2.176.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	9.638.667.000	100	10.203.120.000	100	10.713.276.000	100	11.248.940.000	100	11.811.387.000	100	12.401.956.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	9.611.096.000,00	72	10.175.549.000	72	10.684.326.000	72	11.218.543.000	72	11.779.470.000	72	12.368.443.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	671.000,00	6	671.000	6	705.000	6	740.000	6	777.000	6	816.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	26.900.000,00	6	26.900.000	6	28.245.000	6	28.245.000	6	31.140.000	6	32.697.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.042.000	100	1.094.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	900.000	6	900.000	6	945.000	6	992.000	6	1.042.000	6	1.094.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	100	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	1	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	0	0	1	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen			100	15.611.000	100	16.492.000	100	17.312.000	100	18.172.000	100	19.076.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	966.000,00	12	966.000	12	1.014.000	12	1.065.000	12	1.118.000	12	1.174.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	7.000.000	12	8.310.000	12	8.726.000	12	9.162.000	12	9.620.000	12	10.101.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	12	0	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.103.000	1	1.158.000	1	1.216.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanan ya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	3.700.000	30	2.400.000	30	2.520.000	30	2.646.000	30	2.778.000	30	2.917.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksanan ya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	2.935.000	6	2.935.000	6	3.082.000	6	3.236.000	6	3.398.000	6	3.568.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhihny a sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.200.000	100	4.410.000	100	4.631.000	100	4.862.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4.000.000	2	4.000.000	1	4.200.000	1	4.410.000	1	4.631.000	1	4.862.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhihny a jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	155.770.000	100	155.770.000	100	161.457.000	100	169.636.000	100	178.222.000	100	187.239.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	12	-	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	46.110.000	12	46.110.000	12	46.214.000	12	48.635.000	12	51.176.000	12	53.846.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.050.000	12	1.103.000	12	1.158.000	12	1.216.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	108.660.000	12	108.660.000	12	114.093.000	12	119.798.000	12	125.788.000	12	132.077.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	87.480.000	100	87.480.000	100	91.854.000	100	96.447.000	100	101.269.000	100	106.332.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	9	71.480.000	9	71.480.000	9	75.054.000	9	78.807.000	9	82.747.000	9	86.884.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	2	6.000.000	3	6.000.000	3	6.300.000	3	6.615.000	3	6.946.000	3	7.293.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	11.025.000	2	11.576.000	2	12.155.000
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen	100	28.600.000	100	30.830.000	100	32.372.000	100	33.990.000	100	35.690.000	100	37.474.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	28.600.000	100	29.900.000	100	31.395.000	100	32.965.000	100	34.613.000	100	36.344.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	28.600.000	12	29.900.000	12	31.395.000	12	32.965.000	12	34.613.000	12	36.344.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu	Persen	100	930.000	100	930.000	100	977.000	100	1.025.000	100	1.077.000	100	1.130.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			dan sesuai SOP													
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	930.000	12	930.000	12	977.000	12	1.025.000	12	1.077.000	12	1.130.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	persen	100	35.640.000	100	35.640.000	100	37.422.000	100	39.293.000	100	41.258.000	100	43.321.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	lembaga	11 kelurahan & 2 desa	35.640.000	11 Kelurahan dan 2 Desa	35.640.000	11 Kelurahan dan 2 Desa	37.422.000	11 Kelurahan dan 2 Desa	39.293.000	11 Kelurahan dan 2 Desa	41.258.000	11 Kelurahan dan 2 Desa	43.321.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2	13.181.000	2	13.181.000	2	13.840.000	2	14.532.000	2	15.259.000	2	16.022.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	12	22.459.000	12	22.459.000	12	23.582.000	12	24.761.000	12	25.999.000	12	27.299.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			di Wilayah Kecamatan													
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	36.410.000	100	36.410.000	100	38.231.000	100	40.142.000	100	42.149.000	100	44.257.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Angka	12	36.410.000	12	36.410.000	12	38.231.000	12	40.142.000	12	42.149.000	12	44.257.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	23.500.000	12	23.500.000	12	24.676.000	12	25.909.000	12	27.205.000	12	28.565.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12.910.000	12	12.910.000	12	13.555.000	12	14.233.000	12	14.944.000	12	15.692.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100	23.294.000	100	23.294.000	100	24.459.000	100	25.682.000	100	26.966.000	100	28.314.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Teridentifikasi potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Laporan	12	23.294.000	12	23.294.000	12	24.459.000	12	25.682.000	12	26.966.000	12	28.314.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	23.294.000	50	23.294.000	50	24.459.000	50	25.682.000	50	26.966.000	50	28.314.000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100	1.000.000	100	15.230.000	100	1.050.000	100	1.103.000	100	1.158.000	100	1.216.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	Desa	2	1.000.000	2	15.230.000	2	1.050.000	2	1.103.000	2	1.158.000	2	1.216.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.103.000	1	1.158.000	1	1.216.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Pemerintahan Desa	rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	2	0	2	14.230.000	2	-	2	-	2	-	2	-
	KELURAHAN Bojong															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	97.244.000	100	91.864.000	100	96.467.000	100	101.280.000	100	106.344.000	100	111.661.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	15.092.000	100	17.300.000	100	18.165.000	100	19.073.000	100	20.026.000	100	21.027.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	344	5.792.000	12	8.000.000	12	8.400.000	12	8.820.000	12	9.261.000	12	9.724.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Dokumen	4	9.300.000	4	9.300.000	4	9.765.000	4	10.253.000	4	10.765.000	4	11.303.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Akuntansi SKPD	Akuntansi SKPD													
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.041.000	100	1.093.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanan ya Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	900.000	4	900.000	4	945.000	4	992.000	4	1.041.000	4	1.093.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiny a kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanan ya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanan ya Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiny a layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan	Persen	100	18.724.000	100	16.800.000	100	17.640.000	100	18.521.000	100	19.451.000	100	20.428.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			administrasi umum													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	7.673,000	10	9,000,000.00	10	9,450,000.00	10	9,922,000.00	10	10,418,000.00	10	10,938,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	5.000,000	6	3,000,000	6	3,150,000	6	3,307,000	6	3,474,000	6	3,650,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	4.251,000	10	3,000,000	10	3,150,000	10	3,307,000	10	3,474,000	10	3,650,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1.800.000	12	1,800,000	12	1,890,000	12	1,985,000	12	2,085,000	12	2,190,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	0	0	100	1.000.000	100	1.050.000	100	1.102.000	100	1.157.000	100	1.214.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.102.000	1	1.157.000	1	1.214.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	36.528.000	100	36.528.000		38.353.000		40.271.000		42.282.000		44.392.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15,996,000	12	15,996,000	12	16,795,000	12	17,635,000	12	18,515,000	12	19,440,000
	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20,532,000	12	20,532,000	12	21,548,000	12	22,636,000	12	23,767,000	12	24,952,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	26.000.000	100	19.336.000	100	20.307.000	100	21.321.000	100	22.387.000	100	23.507.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	5	16.000.000	7	16,000,000	7	16,800,000	7	17,640,000	7	18,522,000	7	19,448,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	5	5.000.000	5	2,336,000	5	2,457,000	5	2,579,000	5	2,708,000	5	2,845,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	5.000.000	1	1,000,000	1	1,050,000	1	1,102,000	1	1,157,000	1	1,214,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)													
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatny a peran dan partisipasi lembaga kemasyaraka tan desa/kelura han	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kel	Persen	100	291.970.000	100	297.350.000	100	312.218.000	100	327.828.000	100	344.220.000	100	361.431.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatny a pemberdaya an kelurahan	Persentase Pembanguna n Sa ras Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	116.000.000	5	141,100,000	5	148,155,000	5	155,562,000	5	163,340,000	5	171,510,000
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan	Pokmas	7		6	155,250,000	5	163,013,000	5	171,165,000	5	179,723,000	5	188,705,000
			Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Pokmas	100		4	1,000,000	4	1,050,000	4	1,102,000	4	1,157,000	4	1,216,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya a Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	116.000.000	5	141,100,000	5	148,155,000	5	155,562,000	5	163,340,000	5	171,510,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanan ya Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	5	174.970.000	6	155,250,000	5	163,013,000	5	171,165,000	5	179,723,000	5	188,705,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Pokmas	4	1.000.000	4	1,000,000	4	1,050,000	4	1,102,000	4	1,157,000	4	1,216,000
	KELURAHAN Kedungmenjangan															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	96.474.00	100	96.474.000	100	101.298.000	100	106.363.000	100	111.681.000	100	117.265.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	14.172.000	100	14.175.000	100	14.883.000	100	15.619.000	100	16.410.000	100	17.438.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2,472,000	12	2,475,000	12	2,598,000	12	2,720,000	12	2,865,000	12	3,108,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	6	11,700,000	6	11,700,000	6	12,285,000	6	12,899,000	6	13,545,000	6	14,330,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900,000	100	945,000	100	992,000	100	1,042,000	100	1,184,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		sesuai ketentuan														
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	900,000	6	900,000	6	945,000	6	992,000	6	1,042,000	6	1,184,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	16.340.000	100	13.135.000	100	13.801.000	100	14.501.000	100	15.213.000	100	15.972.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,575,000	1	1,655,000	1	1,736,000	1	1,825,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	7,835,000	3	7,835,000	3	8,236,000	3	8,650,000	3	9,079,000	3	9,524,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	960,000	12	1,200,000	12	1,260,000	12	1,325,000	12	1,389,000	12	1,458,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	4,245,000	12	800,000	12	840,000	12	886,000	12	926,000	12	975,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	240,000	6	240,000	6	240,000	6	240,000	6	240,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,890,000	12	1,985,000	12	2,083,000	12	2,190,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100	8.000.000	10	8,000,000	100	8,400,000	100	8,820,000	100	9,261,000	100	9,725,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	8,000,000	4	8,000,000	12	8,400,000	4	8,820,000	4	9,261,000	4	9,725,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	34.632,000	100	34.392,000	100	36.113,000	100	37.931,000	100	39.840,000	100	41.746,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	14,100,000	36	14,100,000	36	14,805,000	36	15,545,000	36	16,322,000	36	17,140,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20,532,000	12	20,292,000	12	21,308,000	12	22,386,000	12	23,518,000	12	24,616,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	26.596,000	100	25.632,000	100	26.913,000	100	28.260,000	100	29.675,000	100	30.960,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		5	18,667,000	5	18,667,000	5	19,600,000	5	20,580,000	5	21,610,000	5	22,590,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	4	1,929,000	4	965,000	4	1,013,000	4	1,065,000	4	1,120,000	4	1,075,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,300,000	1	6,615,000	1	6,945,000	1	7,285,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	286.172.000	100	284.135.000	100	298.342.000	100	313.259.000	100	328.922.000	100	345.368.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan S a ras Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	286.172.000	100	284.135.000	100	298.342.000	100	313.259.000	100	328.922.000	100	345.368.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan	Pokmas	7		7		7		7		7		7	
			Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Persen	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	120,000,000	3	114,495,000	3	120,270,000	3	126,334,000	3	132,700,000	3	139,383,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	7	168,640,000	7	168,640,000	7	177,072,000	7	185,925,000	7	195,222,000	7	204,985,000
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	500,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
	KELURAHAN Bancar															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	99.573.000	100	99.573.000	100	104.552.000	100	109.779.000	100	115.268.000	100	121.032.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan admnistrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	11.950.000	100	11.950.000	100	12.547.000	100	13.174.000	100	13.833.000	100	14.524.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	58	2,500,000	58	2,500,000	61	2,625,000	64	2,756,000	67	2,894,000	70	3,038,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	9,450,000	12	9,450,000	12	9,922,000	12	10,418,000	12	10,939,000	12	11,486,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.041.000	100	1.093.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	900,000	12	900,000	12	945,000	12	992,000	12	1,041,000	12	1,093,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	NA	-	NA	-	100	200.000	100	840.000	100	1.430.000	100	1.690.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	1	-	1	-	1	100,000	1	420,000	1	715,000	1	845,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan													
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	-	1	-	1	100,000	1	420,000	1	715,000	1	845,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	13.265.000	100	13.265.000	100	13.927.000	100	14.622.000	100	15.354.000	100	16.121.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,575,000	12	1,653,000	12	1,736,000	12	1,823,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	4,365,000	12	4,365,000	12	4,582,000	12	4,812,000	12	5,053,000	12	5,305,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		-		-		-		-		-		

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	4,200,000	12	4,200,000	12	4,410,000	12	4,630,000	12	4,862,000	12	5,105,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanan ya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1,400,000	12	1,400,000	12	1,470,000	12	1,543,000	12	1,620,000	12	1,701,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksanan ya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6	1,800,000	6	1,800,000	6	1,890,000	6	1,984,000	6	2,083,000	6	2,187,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	NA	-	NA	-	100	890.000	100	1.393.000	100	2.000.000	100	3.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	-	1	-	1	890,000	1	1,393,000	1	2,000,000	1	3,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	38.232.000	100	38.232.000	100	39.057.000	100	39.923.000	100	40.832.000	100	41.787.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanan ya Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan		-		-		-		-		-		

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat													
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16,500,000	12	16,500,000	12	17,325,000	12	18,191,000	12	19,100,000	12	20,055,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	21,732,000	12	21,732,000	12	21,732,000	12	21,732,000	12	21,732,000	12	21,732,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	35.226.000	100	35.226.000	100	36.986.000	100	38.835.000	100	40.778.000	100	42.817.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	5	21,356,000	5	21,356,000	5	22,423,000	5	23,544,000	5	24,722,000	5	25,958,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	4	5,870,000	4	5,870,000	4	6,163,000	4	6,471,000	4	6,795,000	4	7,135,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,400,000	1	8,820,000	1	9,261,000	1	9,724,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	379.710.000	100	287.710.000	100	302.095.000	100	317.200.000	100	333.060.000	100	349.713.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	379.710.000	100	287.710.000	100	302.095.000	100	302.095.000	100	333.060.000	100	349.713.000
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan													
			Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Persen	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.625.000	100	2.757.000	100	2.895.000	100	3.039.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	227,000,000	3	135,000,000	3	141,750,000	3	148,837,000	3	156,279,000	3	164,093,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	8	150,210,000	8	150,210,000	8	157,720,000	8	165,606,000	8	173,886,000	8	182,581,000
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,625,000	12	2,757,000	12	2,895,000	12	3,039,000
	KELURAHAN Purbalingga Wetan															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	100.899.000	100	100.899.000	100	105.944.000	100	111.241.000	100	116.803.000	100	122.643.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	14.705.000	100	14.705.000	100	15.440.000	100	16.212.000	100	17.023.000	100	17.874.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	116	5,405,000	161	5,405,000	169	5,675,000	178	5,959,000	186	6,257,000	196	6,570,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Pelaksanaan Tugas ASN													
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	24	9,300,000	24	9,300,000	25	9,765,000	26	10,253,000	28	10,766,000	29	11,304,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.042.000	100	1.094.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	900,000	6	900,000	6	945,000	7	992,000	7	1,042,000	7	1,094,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	1.754.000	100	2.546.000	100	3.527.000	100	4.054.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	1	1,000,000	1	1,300,000	1	1,800,000	1	2,100,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	0	0	0	0	1	754,000	1	1,246,000	1	1,727,000	1	1,954,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Perundang-Undangan	Perundang-Undangan													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	11.232.000	100	11.232.000	100	11.793.000	100	12.383.000	100	13.002.000	100	13.653.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	739,000	3	738,000	3	775,000	3	814,000	3	854,000	4	897,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	5,403,000	6	5,204,000	6	5,464,000	7	5,737,000	7	6,024,000	7	6,325,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	960,000	12	1,140,000	13	1,197,000	13	1,257,000	14	1,320,000	15	1,386,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	1,580,000	2	1,600,000	2	1,680,000	2	1,764,000	2	1,852,000	2	1,945,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	3	1,200,000	3	1,200,000	3	1,260,000	3	1,323,000	3	1,389,000	4	1,459,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD													
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1,350,000	12	1,350,000	13	1,417,000	13	1,488,000	14	1,563,000	15	1,641,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.050.000	100	2.000.000	100	3.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	1,000,000	1	1,050,000	1	2,000,000	1	3,500,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	48.564.000	100	48.564.000	100	48.239.000	100	49.947.000	100	50.692.000	100	51.474.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,500,000	12	12,500,000	13	12,125,000	13	13,781,000	14	14,470,000	15	15,194,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1,000,000	4	1,000,000	4	1,050,000	4	1,102,000	5	1,158,000	5	1,216,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	35,064,000	12	35,064,000	12	35,064,000	12	35,064,000	12	35,064,000	12	35,064,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	25.498.000	100	25.498.000	100	26.773.000	100	28.111.000	100	29.517.000	100	30.994.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4	16,491,000	5	16,491,000	5	17,316,000	6	18,181,000	6	19,090,000	6	20,045,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		3	4,060,000	3	4,060,000	3	4,263,000	3	4,476,000	3	4,700,000	4	4,936,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	4,947,000	1	4,947,000	1	5,194,000	1	5,454,000	1	5,727,000	1	6,013,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel		100	303.145.000	100	303.145.000	100	318.302.000	100	334.220.000	100	350.928.000	100	368.475.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Kelurahan Tepat Waktu		100	303.145.000	100	303.145.000	100	318.302.000	100	334.220.000	100	350.928.000	100	368.475.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	116,400,000	1	120,000,000	2	126,000,000	2	132,300,000	2	138,915,000	3	145,860,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	8	185,245,000	8	181,945,000	8	191,042,000	9	200,590,000	9	210,624,000	10	221,155,000
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	1,500,000	2	1,200,000	2	1,260,000	2	1,330,000	2	1,389,000	2	1,460,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	KELURAHAN Purbalingga Kulon															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	252.134.000	100	252.134.000	100	264.741.000	100	277.978.000	100	291.877.000	100	306.410.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	11.400.000	100	15.800.000	100	16.590.000	100	17.419.000	100	18.290.000	100	19.204.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.100.000	12	6.500,000	12	6.825,000	12	7.166,000	12	7.524,000	12	7.900,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	9.300.000	12	9.300,000	12	9.765,000	12	10.253,000	12	10.766,000	12	11.304,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.041.000	100	1.093.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	Laporan	12	900,000	12	900,000	12	945,000	12	992,000	12	1,041,000	12	1,093,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD													
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	2.232.000	100	4.577.000	100	7.039.000	100	7.624.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	5	1,000,000	5	2,000,000	5	3,500,000	5	3,800,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	5	1,232,000	5	2,577,000	5	3,539,000	5	3,824,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	19.481.000	100	53.904.000	100	56.748.000	100	59.427.000	100	62.398.000	100	65.514.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	996.000	4	1,500,000	4	1,575,000	4	1,654,000	4	1,737,000	4	1,824,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik	paket	12	12.585.000	5	40,604,000	5	42,633,000	5	44,765,000	5	47,003,000	5	49,353,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Logistik Kantor	Kantor yang Disediakan													
	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	4.010.000	4	5.000,000	4	5.250,000	4	5.512,000	4	5.788,000	4	6.075,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0		5.000,000		5.400,000		5.512,000		5.787,000		6.075,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1.800.000	12	1.800,000	12	1.890,000	12	1.984,000	12	2.083,000	12	2.187,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	0	0	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.882.000	100	62.958.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	0	0	5	50.000,000	5	52.500,000	5	55.125,000	5	57.882,000	5	62.958,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Lainnya yang Disediakan													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	63.204.000	100	70.604.000	100	71.901.000	100	73.263.000	100	74.863.000	100	76.194.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.940.000	12	25.940,000	12	27.237,000	12	28.599,000	12	30.199,000	12	31.530,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	42.264.000	12	44,664,000	12	44,664,000	12	44,664,000	12	44,664,000	12	44,664,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	20.250.000	100	60.786.000	100	63.824.000	100	67.175.000	100	70.364.000	100	73.883.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		5	12.450.000	5	15.400,000	5	16.170,000	5	17.140,000	5	17.827,000	5	18.719,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	2	2.800.000	5	4.840,000	5	5.082,000	5	5.335,000	5	5.602,000	5	5.882,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	5.000.000	1	40.546,000	1	42.572,000	1	44.700,000	1	46.935,000	1	49.282,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	481.701.000	100	344.802.000	100	362.042.000	100	380.143.000	100	399.152.000	100	419.109.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya	Persentase Pembangunan Sa ras	Persen	100	481.701.000	100	344.802.000	100	362.042.000	100	380.143.000	100	399.152.000	100	419.109.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Tepat Waktu													
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	340.000.000	4	155.000.000	4	162.750.000	5	170.887.000	5	179.431.000	6	188.403.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	8	138.701.000	8	186.802.000	8	196.142.000	8	205.949.000	8	216.247.000	8	227.060.000
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	3.000.000	2	3.000,000	2	3,150,000	2	3,307,000	2	3,474,000	2	3,646,000
	KELURAHAN Purbalingga Kidul															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	152.285.000	100	176.790.000	100	185.630.000	100	194.911.000	100	204.657.000	100	214.889.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	152.285.000	100	15.840.000	100	18.540.000	100	20.940.000	100	23.340.000	100	25.740.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	5,640,000	2	5,640,000	2	5,940,000	2	6,240,000	2	6,540,000	2	6,840,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	12,800,000	5	10,200,000	5	12,600,000	5	14,700,000	5	16,800,000	5	18,900,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	1.050.000	100	1.200.000	100	1.350.000	100	1.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	900,000	1	900,000	1	1,050,000	1	1,200,000	1	1,350,000	1	1,500,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	1.000.000	100	1.050.000	100	1.100.000	100	1.150.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	-	0	-	1	1,000,000	1	1,050,000	1	1,100,000	1	1,150,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi nya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	25.755.000	100	52.550.000	100	54.800.000	100	57.400.000	100	60.000.000	100	62.600.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,108,000	1	2,108,000	1	2,200,000	1	2,300,000	1	2,400,000	1	2,500,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	25,168,000	6	43,342,000	6	45,000,000	6	47,000,000	6	49,000,000	6	51,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	10	1,320,000	10	1,300,000	10	1,300,000	10	1,300,000	10	1,300,000	10	1,300,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	3,300,000	10	3,000,000	10	3,150,000	10	3,300,000	10	3,450,000	10	3,600,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1,500,000	2	1,000,000	2	1,050,000	2	1,100,000	2	1,150,000	2	1,200,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	1,800,000	2	1,800,000	2	2,100,000	2	2,400,000	2	2,700,000	2	3,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100	16.270.000	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.500.000	100	12.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16,270,000	2	10,000,000	2	10,500,000	2	11,000,000	2	11,500,000	2	12,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	56.580.000	100	60.000.000	100	60.740.000	100	62.820.000	100	65.367.000	100	68.399.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		-		-		-		-		-		-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	3	13,020,000	3	15,000,000	3	15,500,000	3	16,000,000	3	16,500,000	3	17,000,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	43,560,000	2	45,000,000	2	45,240,000	2	46,820,000	2	48,867,000	2	51,399,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	37.500000	100	37.500.000	100	39.000.000	100	40.500.000	100	42.000.000	100	43.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	4	17,500,000	4	17,500,000	4	18,000,000	4	18,500,000	4	19,000,000	4	19,500,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	15	5,000,000	17	5,000,000	19	5,250,000	21	5,500,000	23	5,750,000	25	6,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,500,000	1	17,250,000	1	18,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	261.000.000	100	261.000.000	100	274.050.000	100	287.745.000	100	302.140.000	100	317.250.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Sas Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	261.000.000	100	261.000.000	100	274.050.000	100	287.745.000	100	302.140.000	100	317.250.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	130,000,000	1	100,000,000	1	105,000,000	1	110,000,000	1	115,000,000	1	120,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	7	165,840,000	7	160,000,000	7	168,000,000	7	176,650,000	7	185,990,000	7	196,050,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,050,000	2	1,095,000	2	1,150,000	2	1,200,000
	KELURAHAN Purbalingga Lor															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	103.872.000	100	103.872.000	100	109.066.000	100	114.519.000	100	120.245.000	100	126.257.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	13.050.000	100	13.050.000	100	13.703.000	100	14.387.000	100	15.107.000	100	15.862.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100	3,750,000	100	3,750,000	100	3,938,000	100	4,134,000	100	4,341,000	100	4,558,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	100	9,300,000	100	9,300,000	100	9,765,000	100	10,253,000	100	10,766,000	100	11,304,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.042.000	100	1.094.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	2,520,000	100	900,000	100	945,000	100	992,000	100	1,042,000	100	1,094,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	200.000	100	300.000	100	400.000	100	600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	100	100,000	100	150,000	100	200,000	100	300,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0		100,000		150,000		200,000		300,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	21.618.000	100	23.238.000	100	24.400.000	100	25.621.000	100	26.902.000	100	28.246.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	100	2,122,000	100	1,122,000	100	1,178,000	100	1,237,000	100	1,299,000	100	1,364,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Kantor yang Disediakan													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	100	8,976,000	100	11,596,000	100	12,176,000	100	12,785,000	100	13,424,000	100	14,095,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	4,300,000	100	4,300,000	100	4,515,000	100	4,741,000	100	4,978,000	100	5,227,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	4,420,000	100	4,420,000	100	4,641,000	100	4,873,000	100	5,117,000	100	5,372,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	100	1,800,000	100	1,800,000	100	1,890,000	100	1,985,000	100	2,084,000	100	2,188,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpenuhi sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana	Persen	0	0	0	0	100	887.000	100	1.929.000	100	3.026.000	100	4.083.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemerintah Daerah		prasarana kerja													
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	887,000	1	1,929,000	1	3,026,000	1	4,083,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	32.232.000	100	32.232.000	100	32.757.000	100	33.308.000	100	33.887.000	100	34.495.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	10,500,000	100	10,500,000	100	11,025,000	100	11,576,000	100	12,155,000	100	12,763,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	100	21,732,000	100	21,732,000	100	21,732,000	100	21,732,000	100	21,732,000	100	21,732,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Kantor yang Disediakan													
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	34.452.000	100	34.452.000	100	36.174.000	100	37.983.000	100	37.983.000	100	41.877.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100	19,452,000	100	18,452,000	100	19,374,000	100	20,343,000	100	21,360,000	100	22,429,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	100	5,000,000	100	6,000,000	100	6,300,000	100	6,615,000	100	6,945,000	100	7,293,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,500,000	100	11,025,000	100	11,576,000	100	12,155,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	278.683.000	100	278.683.000	100	292.617.000	100	307.248.000	100	322.610.000	100	338.741.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	278.683.000	100	278.683.000	100	292.617.000	100	307.248.000	100	322.610.000	100	338.741.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	100	100,000,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,250,000	100	115,762,000	100	121,550,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	100	175,683,000	100	175,683,000	100	184,467,000	100	193,691,000	100	203,375,000	100	213,545,000
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	100	3,000,000	100	3,000,000	100	3,150,000	100	3,307,000	100	3,473,000	100	3,646,000
	KELURAHAN Penambongan															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	124.983.000	100	124.983.000	100	131.232.000	100	137.794.000	100	144.683.000	100	151.918.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	19.300.000	100	17.300.000	100	18.166.000	100	19.073.000	100	20.025.000	100	21.026.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	115	7,600,000	115	5,600,000	115	5,880,000	115	6,174,000	115	6,482,000	115	6,806,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	20	11,700,000	20	11,700,000	20	12,285,000	20	12,899,000	20	13,543,000	20	14,220,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.041.000	100	1.093.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	900,000	4	900,000	4	945,000	4	992,000	4	1,041,000	4	1,093,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	300.000	100	400.000	100	500.000	100	600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	1	-	1	150,000	1	200,000	1	250,000	1	300,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	0	-	-	-	1	150,000	1	200,000	1	250,000	1	300,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi nya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	15.986.000	100	14.035.000	100	14.738.000	100	15.480.000	100	16.260.000	100	17.079.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1,200,000	4	1,200,000	4	1,262,000	4	1,333,000	4	1,407,000	4	1,486,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	9,036,000	5	7,085,000	5	7,439,000	5	7,810,000	5	8,200,000	5	8,610,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,050,000	10	1,102,000	10	1,157,000	10	1,214,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	2,400,000	10	2,400,000	10	2,520,000	10	2,646,000	10	2,778,000	10	2,916,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksanan ya Penyelenggar	Jumlah Laporan Penyelenggar	Laporan	8	1,000,000	8	1,000,000	8	1,050,000	8	1,102,000	8	1,157,000	8	1,214,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	dan Konsultasi SKPD	aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1,350,000	12	1,350,000	12	1,417,000	12	1,487,000	12	1,561,000	12	1,639,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100	4.803.000	100	4.803.000		5.043.000		5.295.000		5.559.000		5.836.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4,803,000	1	4,803,000	1	5,043,000	1	5,295,000	1	5,559,000	1	5,836,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	52.808.000	100	52.808.000		55.147.000		57.818.000		60.627.000		63.581.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	115,000	1	115,000	1	120,000	1	126,000	1	132,000	1	138,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	10,440,000	12	10,440,000	12	10,962,000	12	11,510,000	12	12,085,000	12	12,689,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Listrik yang Disediakan													
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1,141,000	6	1,141,000	6	1,198,000	6	1,257,000	6	1,319,000	6	1,384,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	41,112,000	24	41,112,000	24	42,867,000	24	44,925,000	24	47,091,000	24	49,370,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	31.186.000	100	35.137.000	100	36.893.000	100	38.736.000	100	40.671.000	100	42.703.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	5	18,936,000	5	22,887,000	5	24,031,000	5	25,232,000	5	26,493,000	5	27,817,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,250,000	4	5,512,000	4	5,787,000	4	6,076,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		dan Mesin Lainnya	Dipelihara (Unit)													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	7,250,000	1	7,250,000	1	7,612,000	1	7,992,000	1	8,391,000	1	8,810,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	492.764.000	100	492.764.000	100	517.402.000	100	543.272.000	100	570.436.000	100	598.958.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Sars Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	492.764.000	100	492.764.000	100	517.402.000	100	543.272.000	100	570.436.000	100	598.958.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	320,000,000	3	319,684,000	3	344,322,000	3	370,192,000	3	397,356,000	3	425,878,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	7	171,764,000	7	172,080,000	7	172,080,000	7	172,080,000	7	172,080,000	7	172,080,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Unit	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000
	KELURAHAN Kandangampang															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhi nya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	107.561.000	100	107.561.000	100	112.939.000	100	118.586.000	100	124.515.000	100	130.741.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusun nya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	15.850.000	100	18.350.000	100	19.267.500	100	20.230.900	100	21.242.400	100	22.304.600
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100	5,500,000	100	8,000,000	100	8,400,000	100	8,820,000	100	9,261,000	100	9,724,100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	100	10,350,000	100	10,350,000	100	10,867,500	100	11,410,900	100	11,981,400	100	12,580,500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusun nya laporan barang milik daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.250	100	1.041.800	100	1.093.900

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		sesuai ketentuan														
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	900,000	100	900,000	100	945,000	100	992,250	100	1,041,800	100	1,093,900
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	250.000	100	350.000	100	400.000	100	500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	100	250,000	100	350,000	100	400,000	100	500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	22.615.000	100	29.725.000	100	31.211.200	100	32.771.750	100	34.410.225	100	36.130.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	100	970,000	100	800,000	100	840,000	100	882,000	100	926,100	100	972,500

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	100	14,325,000	100	17,985,000	100	18,884,200	100	19,828,400	100	20,819,800	100	21,860,800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100	1,020,000	100	1,140,000	100	1,197,000	100	1,256,850	100	1,319,600	100	1,385,600
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	1,500,000	100	2,000,000	100	2,100,000	100	2,205,000	100	2,315,250	100	2,431,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	3,000,000	100	6,000,000	100	6,300,000	100	6,615,000	100	6,945,750	100	7,293,100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	100	1,800,000	100	1,800,000	100	1,890,000	100	1,984,500	100	2,083,725	100	2,187,900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpenuhinya sarana	Persentase pemenuhan sarana	Persen	100	7.000.000	100	6.000.000	100	6.300.000	100	6.615.000	100	6.945.750	100	7.293.100

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemerintah Daerah	prasarana kerja	prasarana kerja													
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	7,000,000	100	6,000,000	100	6,300,000	100	6,615,000	100	6,945,750	100	7,293,100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	31.970.000	100	30.732.000	100	32.018.600	100	33.532.100	100	35.176.125	100	36.855.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	17,438,000	100	16,200,000	100	17,010,000	100	17,860,500	100	18,753,525	100	19,691,200
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	100	14,532,000	100	14,532,000	100	15,008,600	100	15,671,600	100	16,422,600	100	17,163,800

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	23.854.000	100	21.854.000	100	22.946.700	100	24.094.000	100	25.298.700	100	26.563.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100	12,854,000	100	12,854,000	100	13,496,700	100	14,171,500	100	14,880,075	100	15,624,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,200,000	100	4,410,000	100	4,630,500	100	4,862,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	100	7,000,000	100	5,000,000	100	5,250,000	100	5,512,500	100	5,788,125	100	6,077,500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	282.000.000	100	282.000.000	100	296.100.000	100	310.905.000	100	326.450.000	100	342.770.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		desa/kelurahan														
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	282.000.000	100	282.000.000	100	296.100.000	100	310.905.000	100	326.450.000	100	342.770.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	100	120,000,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,250,000	100	115,762,500	100	121,550,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	100	165,372,000	100	180,000,000	100	189,000,000	100	198,450,000	100	208,372,500	100	218,790,000
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,100,000	100	2,205,000	100	2,315,000	100	2,430,000
	KELURAHAN Kembaran Kulon															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	113.046.000	100	113.046.000	100	118.698.000	100	124.633.000	100	130.865.000	100	137.408.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi	Persentase laporan administrasi keuangan yang	Persen	100	12.000.000	100	12.510.000	100	12.625.000	100	14.447.000	100	14.574.000	100	16.408.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		keuangan tepat waktu	tersusun tepat waktu													
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	115	2,300,000	51	2,310,000	51	2,425,000	51	2,547,000	51	2,674,000	51	2,808,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	20	9,700,000	20	10,200,000	20	10,200,000	20	11,900,000	20	11,900,000	20	13,600,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	900.000	100	1.050.000	100	1.200.000	100	1.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	900,000	4	900,000	4	900,000	4	1,050,000	4	1,200,000	4	1,500,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	0	0	0	0	100	1.500.000	100	2.000.000	100	2.600.000	100	3.200.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	1	1,000,000	1	1,200,000	1	1,600,000	1	2,000,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	2	500,000	2	800,000	2	1,000,000	2	1,200,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	12.380.000	100	12.585.000	100	13.124.000	100	13.691.000	100	14.285.000	100	14.910.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1,158,000	4	1,158,000	4	1,216,000	4	1,277,000	4	1,341,000	4	1,408,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	5,247,000	5	5,247,000	5	5,509,000	5	5,785,000	5	6,074,000	5	6,378,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	11	990,000	12	1,200,000	12	1,260,000	12	1,323,000	12	1,389,000	12	1,459,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	10	1,785,000	10	1,780,000	10	1,869,000	10	1,962,000	10	2,060,000	10	2,163,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu													
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1,400,000	8	1,400,000	8	1,470,000	8	1,544,000	8	1,621,000	8	1,702,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	0	0	0	0	100	1.378.000	100	2.048.000	100	4.474.000	100	5.204.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	1,378,000	1	2,048,000	1	4,474,000	1	5,204,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	58.140.000	100	58.140.000	100	58.814.000	100	59.522.000	100	60.264.000	100	61.045.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,780,000	12	12,780,000	12	13,419,000	12	14,090,000	12	14,794,000	12	15,534,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	700,000	8	700,000	8	735,000	8	772,000	8	810,000	8	851,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	44,660,000	24	44,660,000	24	44,660,000	24	44,660,000	24	44,660,000	24	44,660,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	29.626.000	100	28.911.000		30.357.000		31.875.000		33.468.000		35.141.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan		5	15,726,000	5	15,726,000	5	16,513,000	5	17,338,000	5	18,205,000	5	19,115,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
			Perizinannya (Unit)													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,150,000	4	3,308,000	4	3,473,000	4	3,646,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	10,900,000	1	10,185,000	1	10,694,000	1	11,229,000	1	11,790,000	1	12,380,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	279.518.000	100	279.518.000	100	293.494.000	100	308.168.000	100	323.577.000	100	339.756.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	279.518.000	100	279.518.000	100	293.494.000	100	308.168.000	100	323.577.000	100	339.756.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	131,200,000	2	130,000,000	2	136,500,000	2	143,325,000	2	150,491,000	2	158,016,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pokmas	8	146,918,000	8	148,118,000	8	155,524,000	8	163,300,000	8	171,465,000	8	180,038,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Masyarakat di Kelurahan	an Masyarakat di Kelurahan													
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4	1,400,000	4	1,400,000	4	1,470,000	4	1,543,000	4	1,621,000	4	1,702,000
	KELURAHAN Wirasana															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhi nya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	110.489.000	100	110.489.000	100	116.013.000	100	121.814.000	100	127.905.000	100	134.300.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusun nya laporan admnistrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	10.900.000	100	10.900.000	100	11.445.000	100	12.017.000	100	12.618.000	100	13.249.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	30	1,600,000	30	1,600,000	35	1,680,000	40	1,764,000	45	1,852,000	50	1,945,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	24	9,300,000	24	9,300,000	24	9,765,000	24	10,253,000	24	10,766,000	24	11,304,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	900.000	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.042.000	100	1.094.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	900,000	6	900,000	6	945,000	6	992,000	6	1,042,000	6	1,094,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	100	0	100	0	100	676.000	100	1.310.000	100	1.974.000	100	2.672.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	12	300,000	12	615,000	12	945,000	12	1,292,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	0	-	12	376,000	12	695,000	12	1,029,000	12	1,380,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi nya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	22.183.000	100	22.183.000	100	23.292.000	100	24.457.000	100	25.680.000	100	26.964.000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2,185,000	6	2,185,000	7	2,294,000	7	2,409,000	8	2,529,000	8	2,656,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	9,491,000	12	11,113,000	12	11,669,000	12	12,252,000	12	12,865,000	12	13,508,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	6,185,000	6	6,185,000	6	6,494,000	7	6,819,000	8	7,160,000	10	7,518,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	100	2,700,000	12	2,700,000	12	2,835,000	12	2,977,000	12	3,126,000	12	3,282,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Berbasis Elektronik pada SKPD	n Berbasis Elektronik pada SKPD	n Berbasis Elektronik pada SKPD													
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	0	0	0	0	100	1.500,00 0	100	3.150,00 0	100	4.885,00 0	100	6.705,00 0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	1,000,00 0	1	2,150,00 0	1	3,385,00 0	1	4,705,00 0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	500,000	1	1,000,00 0	1	1,500,00 0	1	2,000,00 0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	53.340.0 00	100	51.718.0 00		52.128.0 00		52.559.0 00		53.011.0 00		53.486.0 00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8,676,00 0	12	8,206,00 0	12	8,616,00 0	12	9,047,00 0	12	9,499,00 0	12	9,974,00 0

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	00	-		-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	44,664,000	12	43,512,000	12	43,512,000	12	43,512,000	12	43,512,000	12	43,512,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	24.788.000	100	24.788.000	100	26.028.000	100	27.329.000	100	28.695.000	100	30.130.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	3	12,178,000	3	12,178,000	3	12,787,000	3	13,426,000	3	14,097,000	3	14,802,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	5	7,610,000	5	7,610,000	5	7,991,000	5	8,390,000	5	8,810,000	5	9,250,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,513,000	1	5,788,000	1	6,078,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	100	305.280.000	100	305.280.000	100	320.544.000	100	336.571.000	100	353.400.000	100	371.070.000
	Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Saran Kelurahan Tepat Waktu	Persen	100	140,000,000	100	140,000,000	100	147,000,000	100	154,350,000	100	162,068,000	100	170,171,000
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan	Unit	100	163,780,000	100	163,780,000	100	171,969,000	100	180,567,000	100	189,596,000	100	199,076,000
			Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Persen	100	1,500,000	100	1,500,000	100	1,575,000	100	1,654,000	100	1,736,000	100	1,823,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	100	140,000,000	100	140,000,000	100	147,000,000	100	154,350,000	100	162,068,000	100	170,171,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdaya	Pokmas	100	163,780,000	100	163,780,000	100	171,969,000	100	180,567,000	100	189,596,000	100	199,076,000

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()	Kinerja	Pagu Indikatif ()
		Masyarakat di Kelurahan	an Masyarakat di Kelurahan													
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksanan ya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	100	1,500,00 0	100	1,500,00 0	100	1,575,00 0	100	1,654,00 0	100	1,736,00 0	100	1,823,00 0

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Berdaya	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
		Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purbalingga Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purbalingga

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94	94.5	95	95.5	96	96.5	
2.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	4,22	4,32	4,42	4,52	4,62	4,72	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	69.55	70	70.5	71	71.5	72	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, urusan kewilayahan tidak memiliki indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Purbalingga

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL								

BAB V

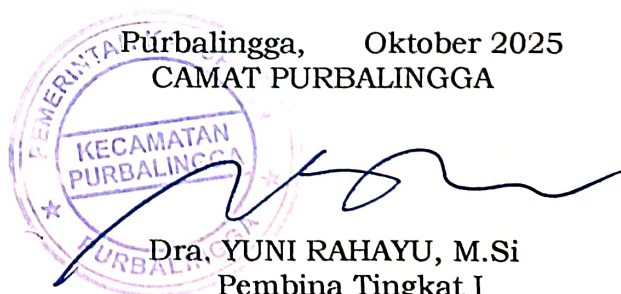
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis selama lima tahun, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Renstra Kecamatan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purbalingga.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan agar Renstra Kecamatan Purbalingga dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Purbalingga, Oktober 2025
CAMAT PURBALINGGA



Dra. YUNI RAHAYU, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690601 198803 2 001